Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN : 3046-8132; dan p-ISSN : 3046-868X; Hal. 17-33
DOI: https://doi.org/10.61132/apke.v3i4.2642
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/APKE

Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Penjualan dan Penagihan pada Unit Usaha Mini Market Perpustakaan (MMP) KOPMA "Almamater" UNM

Andi Chahyani Purnama[1*], Nureny. N[2], Nur Adivah[3], Alia Rezki Amalia[4]
[1-4]Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
**Penulis Korespondens: andichahyanipurnama@gmail.com*

Abstract. *Student cooperatives (KOPMA) now operate retail units with complex daily transactions, which increases operational risk and demands adequate internal control, yet studies on the sales and collection cycle in these units remain limited. This study aims to analyze the implementation of internal control over the sales and collection cycle at the Library Mini Market (MMP) business unit of KOPMA "Almamater" Universitas Negeri Makassar. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through interviews with KOPMA administrators and MMP employees, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through source and method triangulation. The findings show that internal control is already in place through daily supervision by management, digital transaction recording using the Bubble application supplemented by manual records, daily cash and stock checks, purchase control based on the monthly budget (APBK), limited internal credit transactions, and reporting of discrepancies. However, weaknesses remain, including inadequate segregation of duties, cash counts performed by the same cashier who handles transactions, comprehensive physical inventory counts conducted only monthly, manual inventory recording, and the absence of written SOPs and handover documents. It is concluded that internal control at MMP is functioning but not yet optimal. Strengthening it through cross-checks by the treasurer, written SOPs, and more routine inventory checks is recommended to improve the unit's accountability.*

Keywords: *Case Study; Internal Control; Minimarket; Sales and Collection Cycle; Student Cooperative.*

Abstrak. Koperasi mahasiswa (KOPMA) kini mengelola unit usaha ritel dengan transaksi harian yang kompleks, sehingga meningkatkan risiko operasional dan menuntut pengendalian internal yang memadai, sementara kajian mengenai siklus penjualan dan penagihan pada unit tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal atas siklus penjualan dan penagihan pada Unit Usaha Mini Market Perpustakaan (MMP) KOPMA "Almamater" Universitas Negeri Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus KOPMA dan karyawan MMP, observasi, serta dokumentasi yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal telah berjalan melalui pengawasan harian oleh pengurus, pencatatan transaksi digital melalui aplikasi Bubble yang dilengkapi pencatatan manual, pemeriksaan kas dan stok, pengendalian pembelian berdasarkan APBK, pembatasan transaksi kredit internal, serta pelaporan apabila terjadi selisih. Namun, masih ditemukan kelemahan berupa pemisahan tugas yang belum memadai, pemeriksaan kas yang dilakukan sendiri oleh kasir, perhitungan fisik persediaan secara menyeluruh yang baru dilakukan setiap bulan, pencatatan persediaan yang masih manual, serta belum adanya SOP tertulis dan dokumen serah terima. Dengan demikian, pengendalian internal pada MMP telah berjalan tetapi belum optimal. Penguatan melalui pemeriksaan silang oleh bendahara, penyusunan SOP tertulis, dan pemeriksaan persediaan yang lebih rutin direkomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas unit usaha.

Kata Kunci: Koperasi Mahasiswa; Mini Market; Pengendalian Internal; Siklus Penjualan dan Penagihan; Studi Kasus.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu pilar sistem perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dituntut untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, tidak terkecuali koperasi yang

Naskah Masuk: 16 Juli 2026; Revisi: 18 Agustus 2026; Diterima: 19 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

tumbuh di lingkungan perguruan tinggi (Muthowif *et al*., 2026). Salah satu bentuk koperasi yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi adalah Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Keberadaan KOPMA tidak hanya bertujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam mengelola suatu organisasi dan usaha. Melalui KOPMA, mahasiswa dapat belajar mengenai perencanaan kegiatan usaha, pengelolaan keuangan, pelayanan kepada anggota, sampai dengan proses pengambilan keputusan secara bersama. Dengan demikian, KOPMA memiliki fungsi sebagai tempat pembelajaran kewirausahaan sekaligus sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara nyata (Achmadi *et al*., 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa KOPMA di berbagai perguruan tinggi seperti KOPMA UNS yang mengelola minimarket, jasa keuangan syariah, hingga layanan komunikasi (Achmadi *et al*., 2025), maupun Kopma GWK UPN "Veteran" Jawa Timur yang mengembangkan unit usaha seperti Kopma Copy Center dan Kopmart pasca transisi status kelembagaan (Anhar, 2026) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit simpan pinjam, melainkan telah berkembang menjadi organisasi bisnis yang memiliki berbagai unit usaha dengan aktivitas transaksi yang cukup kompleks.

Kompleksitas transaksi tersebut membawa konsekuensi pada meningkatnya risiko operasional, khususnya pada unit usaha yang bersentuhan langsung dengan siklus penjualan dan penagihan, seperti minimarket. Karakteristik unit usaha ritel yang melibatkan penerimaan kas tunai, pengelolaan piutang atau transaksi kredit anggota, pengendalian persediaan, serta rekonsiliasi penjualan harian menuntut adanya sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah kesalahan, kecurangan (*fraud*), maupun kebocoran pendapatan. Sementara itu, tata kelola KOPMA umumnya dijalankan oleh pengurus yang merupakan mahasiswa dengan masa jabatan singkat dan *turnover* tinggi akibat siklus perkuliahan, sebuah kondisi struktural memengaruhi proses transfer pengetahuan dan keberlanjutan prosedur pengendalian yang telah diterapkan sebelumnya (Anhar, 2026). Pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan sebenarnya telah banyak dikaji pada berbagai jenis entitas. Rahmadani dan Abidin (2022) serta Putri *et al*. (2024) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas dapat mendukung pengendalian internal apabila disertai prosedur, pembagian fungsi, dan dokumentasi yang memadai. Kelemahan berupa perangkapan fungsi penjualan dan penerimaan kas ditemukan pada berbagai perusahaan oleh Pujiati dan Yusnaldi (2022), Marzuki *et al*. (2024), serta Handini dan Kusumo (2026), dan juga pada unit swalayan oleh Maulana dan Permatasari (2024). Pada sisi persediaan, Arlindayani *et al*. (2022) menemukan perbedaan antara persediaan fisik dan pencatatan pada koperasi karyawan, sedangkan Widiapsari *et al*. (2024) mengkaji pengendalian persediaan pada perusahaan ritel.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan, distributor, UMKM, dan unit swalayan, sedangkan satu-satunya yang berlatar koperasi (Arlindayani *et al*., 2022) berfokus pada koperasi karyawan dan perhitungan persediaan. Sementara itu, kajian akademik mengenai KOPMA di Indonesia selama ini masih didominasi oleh topik pembentukan kelembagaan, penguatan jiwa kewirausahaan, dan transformasi tata kelola secara umum (Muthowif *et al*., 2026; Achmadi *et al*., 2025; Anhar, 2026). Dengan demikian, di antara penelitian terdahulu yang ditelaah penulis, belum terdapat kajian yang secara spesifik menyoroti pengendalian internal atas siklus penjualan dan penagihan pada unit usaha ritel KOPMA, padahal KOPMA memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dikelola oleh pengurus mahasiswa dengan masa jabatan singkat dan melayani transaksi kredit terbatas pada pihak internal. Padahal, unit usaha semacam ini merupakan sumber pendapatan operasional yang signifikan sekaligus titik rawan risiko finansial bagi keberlangsungan koperasi mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut. Kondisi ini juga ditemukan pada KOPMA "Almamater" Universitas Negeri Makassar, yang saat ini mengelola tiga unit usaha, yaitu Kopma Store, Mie Time, dan Mini Market Perpustakaan. Keberadaan unit-unit usaha tersebut menunjukkan bahwa KOPMA "Almamater" UNM tidak lagi sebatas koperasi simpan pinjam, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas bisnis dengan aktivitas penjualan tunai maupun berbasis keanggotaan yang berjalan setiap hari. Fokus penelitian ini diarahkan pada unit Mini Market Perpustakaan, mengingat unit ini merupakan unit usaha ritel dengan frekuensi transaksi penjualan tertinggi di antara ketiga unit usaha yang dimiliki, sehingga relevan untuk dikaji dari sisi pengendalian internal siklus penjualan dan penagihannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengendalian internal atas siklus penjualan dan penagihan diterapkan pada unit usaha Mini Market Perpustakaan KOPMA "Almamater" Universitas Negeri Makassar, dengan harapan dapat memberikan gambaran bagaimana pengendalian internal yang diterapkan dalam kegiatan penjualan dan penagihan, termasuk bagian-bagian yang sudah berjalan dengan baik maupun bagian yang masih memiliki celah pengendalian, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengurus KOPMA "Almamater" UNM dalam meningkatkan pengelolaan dan tata kelola keuangan, sehingga kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara lebih akuntabel dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Siklus Penjualan dan Penagihan

Siklus penjualan dan penagihan merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan proses penjualan barang atau jasa sampai dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Ramadhani *et al*. (2026) menjelaskan bahwa siklus penjualan dan penagihan mencakup aktivitas mulai dari pemrosesan pesanan pelanggan, pengiriman barang atau jasa, penerbitan faktur, hingga penerimaan pembayaran. Dengan demikian, siklus penjualan dan penagihan tidak hanya berkaitan dengan terjadinya transaksi penjualan, tetapi juga mencakup aktivitas pencatatan dan penerimaan pembayaran yang timbul dari transaksi tersebut. Siklus penjualan dan penagihan juga berkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan piutang dan penerimaan kas. Fernanda *et al*. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas siklus penjualan dan penagihan dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang hingga dikonversi menjadi kas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan perputaran piutang dan penurunan waktu penagihan mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan siklus penjualan dan penagihan. Sementara itu, Ramadhani *et al*. (2026) menjelaskan bahwa siklus penjualan dan penagihan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penjualan, tetapi juga mencakup pengelolaan piutang, kebijakan kredit, serta proses penagihan untuk menjaga kelancaran arus kas.

Dengan demikian, siklus penjualan dan penagihan merupakan rangkaian aktivitas yang perlu dikelola secara terstruktur mulai dari transaksi penjualan sampai dengan penerimaan pembayaran. Fernanda *et al*. (2025) memang secara langsung meneliti siklus penjualan dan penagihan, sedangkan Ramadhani *et al*. (2026) juga secara khusus membahas siklus tersebut. Pada kegiatan usaha, siklus penjualan dan penagihan memerlukan prosedur yang jelas agar setiap transaksi dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan. Karlina *et al*. (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus penjualan dan penagihan berkaitan dengan prosedur transaksi serta pengendalian terhadap setiap aktivitas yang terjadi di dalam siklus tersebut. Pengendalian diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan, keterlambatan pembayaran, maupun penyimpangan dalam penerimaan kas. Dalam penelitian ini, siklus penjualan dan penagihan dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dimulai dari proses pelanggan melakukan pembelian, pencatatan transaksi, penerimaan pembayaran, hingga penagihan terhadap transaksi yang dilakukan secara kredit. Konsep tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penerapan pengendalian internal pada Unit Usaha Mini Market Perpustakaan (MMP) KOPMA "Almamater" UNM.

Pengendalian Internal pada Siklus Penjualan dan Penagihan

Pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi penjualan telah memperoleh perlakuan yang sesuai, penerimaan kas dapat dipertanggungjawabkan, dan potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalkan. Pengendalian dapat dilakukan melalui pembagian tugas, otorisasi transaksi, pencatatan, pemeriksaan, serta pemantauan terhadap aktivitas penjualan dan penerimaan pembayaran. Marzuki *et al*. (2024) juga menemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas belum optimal ketika terdapat perangkapan fungsi dan dokumen serta catatan akuntansi yang belum lengkap. Oleh karena itu, pengendalian internal tidak hanya bergantung pada penggunaan sistem informasi, tetapi juga memerlukan pembagian tugas, kelengkapan dokumentasi, dan prosedur yang jelas. Pengendalian internal dalam siklus penjualan dan penerimaan kas juga berkaitan dengan kejelasan pembagian fungsi, kelengkapan dokumen, serta prosedur pencatatan transaksi. Rahmadani dan Abidin (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas didukung oleh prosedur transaksi, pembagian fungsi dan tanggung jawab, serta kelengkapan dokumen dan catatan. Pujiati dan Yusnaldi (2022) juga menemukan bahwa pengendalian internal masih menghadapi kelemahan ketika beberapa fungsi dilaksanakan oleh orang yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemisahan tugas merupakan salah satu aspek penting dalam mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Saputra *et al*. (2026) menunjukkan bahwa pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan perlu didukung oleh penerapan komponen pengendalian yang memadai. Pengendalian tidak hanya berkaitan dengan proses transaksi, tetapi juga mencakup dokumentasi, pemantauan, serta prosedur yang digunakan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas penjualan dan penagihan. Dalam konteks MMP, pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan menjadi penting karena kegiatan operasional melibatkan transaksi penjualan setiap hari, penerimaan pembayaran tunai dan QRIS, pengelolaan persediaan, serta transaksi kredit terbatas kepada pihak internal. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian dapat dilihat dari bagaimana prosedur transaksi dilaksanakan, bagaimana kas dan persediaan diperiksa, serta bagaimana kesalahan atau selisih ditangani.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan di Unit Usaha Mini Market Perpustakaan (MMP) KOPMA "Almamater" UNM. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi secara alami, dengan mengutamakan proses, makna, serta interpretasi terhadap suatu peristiwa atau aktivitas yang diteliti (Nasution, 2023). Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena secara kontekstual melalui data berupa narasi, hasil observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan (Ratnaningtyas *et al*., 2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap satu objek tertentu, yaitu Unit Usaha MMP KOPMA "Almamater" UNM. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian dapat menggambarkan secara menyeluruh bagaimana prosedur penjualan dan penagihan dilakukan, bagaimana pembagian tugas diterapkan, serta bagaimana aktivitas pengendalian internal dijalankan dalam kegiatan operasional unit usaha tersebut. Pendekatan studi kasus sesuai digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks nyata melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan (Pradono *et al*., 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam operasional MMP KOPMA "Almamater" UNM, seperti pengurus koperasi, pengelola unit usaha, serta pihak yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan dan penagihan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen pendukung seperti catatan transaksi, dokumen penjualan, laporan keuangan, serta dokumen operasional lainnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian (Pradono *et al*., 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur transaksi penjualan, proses penagihan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas operasional pada MMP KOPMA "Almamater" UNM, khususnya terkait proses penerimaan pesanan, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, dan aktivitas penagihan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas operasional unit usaha. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dilakukan

untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai objek penelitian (Ratnaningtyas *et al*., 2023). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al*., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menggambarkan kondisi penerapan pengendalian internal pada MMP KOPMA "Almamater" UNM. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan teknik triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai penerapan pengendalian internal pada siklus penjualan dan penagihan (Pradono *et al*., 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengendalian Internal pada Unit Usaha MMP

Penelitian ini dilakukan pada Unit Usaha Mini Market Perpustakaan (MMP) KOPMA "Almamater" Universitas Negeri Makassar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengurus KOPMA dan karyawan MMP yang terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional, khususnya kegiatan penjualan, penerimaan pembayaran, pengelolaan persediaan, pencatatan transaksi, serta pengawasan kegiatan usaha. Pengumpulan data juga didukung dengan observasi dan dokumentasi sebagaimana rancangan penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara, pengendalian internal pada MMP telah diterapkan melalui beberapa aktivitas, antara lain pengawasan harian oleh pengurus, pencatatan transaksi menggunakan aplikasi Bubble, pencatatan manual, pemeriksaan kas, pemeriksaan persediaan, pengendalian pembelian melalui APBK, serta pelaporan apabila terjadi kesalahan atau selisih. Pengurus KOPMA menjelaskan bahwa fungsi pengurus dalam MMP lebih banyak berkaitan dengan controlling, terutama terhadap penjualan dan pengeluaran unit usaha. Pengawasan tersebut dilakukan setiap hari oleh pengurus maupun staf usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah menjadi bagian dari kegiatan operasional MMP. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan belum sepenuhnya optimal. Pengurus mengakui bahwa masih terdapat beberapa

celah, baik dalam digitalisasi maupun pencatatan keuangan, sehingga sistem pengendalian masih perlu dikembangkan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Putri *et al*. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas dapat mendukung pengendalian internal, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada penerapan prosedur dan mekanisme pengawasan yang memadai. Temuan tersebut juga sejalan dengan Rahmadani dan Abidin (2022) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas dapat mendukung pengendalian internal apabila disertai prosedur, pembagian fungsi, serta dokumentasi transaksi yang memadai. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Bubble pada MMP merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pengendalian internal, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada prosedur dan pengawasan yang diterapkan dalam kegiatan operasional.

Pengendalian atas Proses Penjualan dan Penerimaan Kas

Proses penjualan pada MMP dilakukan secara langsung melalui kasir. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, konsumen memilih barang yang dibutuhkan kemudian melakukan pembayaran di kasir. Karyawan selanjutnya memasukkan barang yang dibeli ke dalam aplikasi Bubble. Pembayaran dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu tunai dan QRIS. Penerapan aplikasi dalam proses transaksi menunjukkan bahwa MMP telah menggunakan sistem digital dalam pencatatan penjualan. Selain pencatatan melalui aplikasi, MMP juga melakukan pencatatan secara manual. Setelah kegiatan penjualan selesai, karyawan melakukan perhitungan berdasarkan kondisi riil kemudian mencocokkannya dengan hasil yang terdapat pada aplikasi. Dengan demikian, terdapat dua sumber pencatatan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengecekan. Penerapan pencatatan digital dan manual tersebut merupakan bentuk pengendalian yang dapat membantu meningkatkan keterlacakan transaksi. Penelitian Anggraeni *et al*. (2024) menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan pengendalian internal penjualan tunai. Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan kontribusi terhadap pengendalian melalui pencatatan transaksi yang lebih sistematis. Namun, penggunaan sistem digital belum sepenuhnya menghilangkan risiko kesalahan. Karyawan menyampaikan bahwa kesalahan input, kesalahan harga, maupun kekurangan atau kelebihan uang masih dapat terjadi, terutama ketika kondisi MMP sedang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perlu didukung dengan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak lain.

Pemisahan Tugas dalam Aktivitas Penjualan dan Penerimaan Kas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kelemahan pengendalian internal MMP terdapat pada pemisahan tugas. Berdasarkan keterangan pengurus, aktivitas pada MMP masih dilakukan oleh karyawan yang sama, mulai dari melakukan pemindaian barang, menerima pembayaran, memberikan uang kembalian, hingga melakukan perhitungan kas. Karyawan juga menyatakan bahwa perhitungan kas pada akhir kegiatan dilakukan sendiri. Karyawan mencocokkan hasil pada aplikasi dengan kondisi riil, baik transaksi QRIS maupun tunai. Dengan demikian, pihak yang menjalankan transaksi juga melakukan pemeriksaan atas hasil transaksi tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip pemisahan fungsi belum diterapkan secara optimal. Pemisahan fungsi penting karena pihak yang melakukan transaksi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pihak yang melakukan pemeriksaan atas transaksi tersebut. Apabila seluruh proses dilakukan oleh orang yang sama, kesalahan ataupun penyimpangan berpotensi tidak segera terdeteksi. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Handini dan Kusumo (2026) yang menemukan adanya kelemahan dalam pemisahan tugas pada sistem penjualan dan penerimaan kas, khususnya ketika personel penjualan juga bertanggung jawab terhadap penerimaan pembayaran. Temuan tersebut juga didukung oleh Pujiati dan Yusnaldi (2022) yang menemukan bahwa beberapa fungsi dalam sistem penjualan dan penerimaan kas masih dilakukan oleh orang yang sama sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perangkapan fungsi dapat menjadi salah satu kelemahan dalam pengendalian karena pihak yang melakukan transaksi juga dapat terlibat dalam proses pemeriksaan atau pengelolaan penerimaan kas. Hasil penelitian Marzuki *et al*. (2024) juga menunjukkan bahwa adanya perangkapan fungsi dalam aktivitas penjualan dan penerimaan kas dapat menyebabkan sistem pengendalian internal belum berjalan secara optimal. Temuan yang lebih baru ditunjukkan oleh Handini dan Kusumo (2026), yang menemukan kelemahan pemisahan tugas ketika personel penjualan juga bertanggung jawab dalam memproses transaksi dan menerima pembayaran. Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan MMP, di mana karyawan yang melakukan transaksi penjualan juga melakukan perhitungan kas pada akhir kegiatan. Dengan demikian, pemeriksaan silang oleh pihak lain diperlukan untuk meningkatkan independensi pemeriksaan dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan yang tidak terdeteksi. Hasil penelitian Yadiati *et al*. (2024) juga menekankan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas perlu didukung oleh pengendalian internal yang memadai agar informasi transaksi dapat digunakan secara efektif dalam pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut,

MMP dapat memperkuat pengendalian dengan menerapkan pemeriksaan silang (cross-check) oleh bendahara atau pengurus terhadap hasil perhitungan kas karyawan.

Pengendalian Persediaan dan Pemeriksaan Stok

Selain aktivitas penjualan dan penerimaan kas, pengendalian persediaan menjadi bagian penting dalam operasional MMP. Berdasarkan wawancara, karyawan melakukan *screening* stok setiap hari untuk mengetahui produk yang habis atau jumlahnya mulai menipis. Kegiatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan *restock*. Namun, pemeriksaan fisik secara menyeluruh belum dilakukan setiap hari. Perhitungan stok secara keseluruhan dilakukan pada akhir bulan dan masih dilakukan secara manual. Karyawan melakukan pendataan dengan memotret kondisi stok kemudian melakukan perhitungan secara manual. Kondisi tersebut menimbulkan risiko adanya selisih antara persediaan fisik dan catatan pada sistem. Karyawan juga menyampaikan bahwa kehilangan barang tidak selalu dapat diketahui karena pemeriksaan harian lebih berfokus pada barang yang habis atau menipis. Apabila terjadi kehilangan dan tidak diketahui secara langsung, perbedaannya berpotensi baru diketahui pada saat pemeriksaan stok bulanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arlindayani *et al*. (2022) pada koperasi karyawan yang menemukan adanya perbedaan antara jumlah persediaan fisik dan pencatatan akibat kesalahan pencatatan pada sistem kasir serta proses input transaksi penjualan. Penelitian tersebut merekomendasikan pelaksanaan perhitungan fisik persediaan secara rutin sebagai bagian dari pengendalian internal. Temuan mengenai pemeriksaan persediaan juga sejalan dengan Pabaru *et al*. (2024) yang menunjukkan bahwa pengendalian persediaan dapat dilakukan melalui pengelolaan stok dan pemeriksaan fisik secara berkala. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan persediaan, meskipun pemeriksaan fisik masih dilakukan secara manual. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan sistem pencatatan perlu tetap didukung oleh pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan kondisi persediaan yang sebenarnya. Hasil tersebut juga sejalan dengan Widiapsari *et al*. (2024) yang menemukan bahwa pengendalian internal persediaan pada perusahaan retail dapat diperkuat melalui prosedur pembelian, pencatatan, pengelolaan persediaan, serta pemeriksaan yang terstruktur. Dengan demikian, pemeriksaan persediaan pada MMP yang saat ini dilakukan secara menyeluruh setiap akhir bulan perlu diperkuat dengan pemeriksaan berkala, khususnya terhadap barang yang memiliki tingkat penjualan dan risiko kehilangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan stok pada MMP sudah merupakan bentuk pengendalian yang positif, tetapi masih perlu diperkuat melalui pemeriksaan fisik yang lebih rutin dan pencatatan persediaan yang lebih terintegrasi.

Pengendalian Anggaran dan Pembelian Persediaan

Pengendalian pembelian persediaan pada MMP dilakukan melalui APBK bulanan. Pengurus menjelaskan bahwa pembelian stok pada kondisi normal disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengeluaran untuk pembelian barang tidak dilakukan secara bebas, tetapi terdapat batas anggaran yang menjadi dasar pengendalian. Meskipun demikian, terdapat kondisi tertentu ketika pembelian melebihi APBK. Salah satu contohnya terjadi pada periode penerimaan mahasiswa baru ketika pengurus memperkirakan jumlah pelanggan akan meningkat. Pada periode tersebut, pembelian stok dapat mencapai dua kali lipat dari anggaran yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut didasarkan pada analisis terhadap kondisi penjualan dan kebutuhan persediaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian anggaran MMP memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi operasional. Namun, keputusan pembelian yang melebihi anggaran sebaiknya tetap didukung oleh dokumentasi dan otorisasi yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi bahan evaluasi bagi pengurus berikutnya.

Pengendalian Transaksi Kredit dan Penagihan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa MMP pada dasarnya tidak memberikan fasilitas piutang kepada pelanggan umum. Transaksi kredit lebih terbatas pada pengurus atau pihak internal tertentu. Untuk pengurus dan karyawan, terdapat batas kewajiban sebesar Rp15.000 per hari. Penagihan kewajiban internal dilakukan melalui pemotongan gaji oleh bendahara. Mekanisme tersebut dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran karena proses pelunasan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, terdapat pula transaksi dengan distributor. Namun, transaksi tersebut perlu dibedakan dari penagihan piutang kepada pelanggan karena kewajiban kepada distributor merupakan utang MMP kepada pemasok. Distributor melakukan penagihan kepada unit usaha sesuai dengan transaksi pembelian yang dilakukan. Dengan adanya pembatasan transaksi kredit internal dan mekanisme pemotongan gaji, MMP telah memiliki bentuk pengendalian terhadap risiko piutang internal. Meskipun demikian, prosedur tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis agar batas kredit, pihak yang berwenang, mekanisme pencatatan, serta prosedur pelunasannya dapat diterapkan secara konsisten. Fernanda *et al*. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas siklus penjualan dan penagihan dapat tercermin dari kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang dan mempercepat konversinya menjadi kas. Dalam konteks MMP, pembatasan transaksi kredit hanya kepada pihak internal serta mekanisme pemotongan gaji merupakan bentuk pengendalian yang dapat membatasi risiko keterlambatan pembayaran. Meskipun

demikian, pencatatan dan prosedur penagihan tetap perlu didokumentasikan agar kewajiban yang timbul dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Pelaporan dan Pemeriksaan Kas Harian

MMP menerapkan pelaporan hasil penjualan secara harian. Setelah menyelesaikan kegiatan operasional, karyawan melakukan perhitungan kas dan mencocokkannya dengan catatan pada aplikasi. Hasil perhitungan kemudian dicatat secara manual dan dimasukkan ke dalam sistem digital. Pengurus juga melakukan pemeriksaan laporan secara rutin setiap hari. Apabila terdapat selisih antara catatan dengan kondisi riil, karyawan diwajibkan melaporkan kondisi tersebut kepada bendahara. Mekanisme ini menunjukkan adanya aktivitas pemantauan terhadap hasil transaksi. Akan tetapi, pemeriksaan kas masih memiliki kelemahan karena proses perhitungan awal dilakukan oleh karyawan yang juga bertanggung jawab atas transaksi penjualan. Dengan demikian, diperlukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak yang berbeda untuk memperkuat independensi pemeriksaan. Penelitian Maulana dan Permatasari (2024) pada unit swalayan menunjukkan bahwa penggabungan fungsi penjualan dan penerimaan kas dapat terjadi karena pertimbangan efisiensi, tetapi kondisi tersebut menyebabkan sistem belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Temuan tersebut relevan dengan kondisi MMP karena keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan beberapa fungsi masih dilakukan oleh karyawan yang sama.

Penanganan Kesalahan dan Selisih Transaksi

Pengendalian terhadap kesalahan dan selisih transaksi juga penting karena kelemahan dalam proses penjualan dan penagihan dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan. Amri *et al*. (2025) menjelaskan bahwa penguatan pengendalian internal, verifikasi dokumen, dan pemantauan transaksi merupakan bagian penting dalam mengurangi peluang terjadinya kecurangan pada siklus penjualan dan penagihan. Dalam konteks MMP, kewajiban melaporkan selisih kepada bendahara telah menjadi bentuk pengendalian, tetapi pencatatan selisih secara khusus masih diperlukan agar setiap kejadian dapat ditelusuri, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Apabila terjadi kesalahan, karyawan melaporkannya kepada bendahara. Pengurus kemudian menentukan tindak lanjut berdasarkan penyebab terjadinya selisih. Apabila kesalahan masih berkaitan dengan kesalahan input atau kondisi yang dapat ditoleransi, kesalahan tersebut dapat diberikan toleransi. Namun, apabila kesalahan terjadi karena kelalaian karyawan, tanggung jawab dapat dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan bentuk pengendalian yang penting karena kesalahan tidak dibiarkan tanpa informasi kepada pengurus. Namun, agar lebih efektif, setiap selisih sebaiknya dicatat dalam

dokumen khusus yang memuat tanggal kejadian, jenis selisih, nilai selisih, penyebab, pihak yang bertanggung jawab, serta tindakan penyelesaian.

Pelatihan dan Transfer Pengetahuan dalam Pengendalian Internal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengurus baru memperoleh pelatihan setelah terpilih sebagai pengurus. Pelatihan diberikan oleh pengurus demisioner. Mekanisme serah terima informasi kepada pengurus berikutnya juga dilakukan melalui pelatihan tersebut. Sementara itu, karyawan MMP memperoleh pelatihan selama kurang lebih satu minggu. Namun, berdasarkan keterangan informan, pelatihan tersebut dalam praktiknya lebih banyak didasarkan pada pengalaman pribadi. Informan juga menyampaikan bahwa kondisi normalnya karyawan seharusnya memperoleh pengawasan dari pengurus selama masa pelatihan, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi dalam pengalaman informan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia masih menjadi salah satu bagian yang perlu diperkuat. Pergantian pengurus yang relatif singkat dapat menyebabkan pengetahuan mengenai prosedur operasional tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut relevan dengan kondisi KOPMA yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian bahwa masa jabatan pengurus yang singkat dapat memengaruhi transfer pengetahuan dan keberlanjutan prosedur pengendalian. Oleh karena itu, proses pelatihan sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui penyampaian secara langsung dari pengurus sebelumnya, tetapi juga dilengkapi dengan SOP tertulis dan dokumen serah terima.

Evaluasi Pengendalian Internal pada MMP

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengendalian internal pada MMP telah berjalan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengawasan harian, penggunaan aplikasi Bubble, pencatatan manual dan digital, pemeriksaan kas harian, pemeriksaan stok, pengendalian pembelian berdasarkan APBK, pembatasan transaksi kredit internal, serta pelaporan apabila terjadi kesalahan atau selisih. Di sisi lain, masih ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut terutama terlihat pada belum adanya pemisahan tugas yang memadai, pemeriksaan kas yang masih dilakukan secara mandiri oleh kasir, pemeriksaan persediaan secara menyeluruh yang baru dilakukan setiap bulan, pencatatan persediaan yang masih manual, serta belum optimalnya dokumentasi SOP dan transfer pengetahuan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan sistem digital saja belum cukup untuk menjamin efektivitas pengendalian internal. Sistem tetap membutuhkan pembagian tugas, pemeriksaan silang, dokumentasi, dan pengawasan. Hal tersebut didukung oleh penelitian. Putri *et al*. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas perlu didukung oleh prosedur dan SOP yang memadai agar pengendalian

internal dapat berjalan efektif. Dengan demikian, pengendalian internal MMP dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum optimal. Kesimpulan tersebut juga konsisten dengan penilaian pengurus sendiri yang menyatakan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan saat ini masih memiliki beberapa celah, meskipun telah mengalami perbaikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa peningkatan pengendalian internal MMP tidak harus selalu dilakukan melalui penambahan sumber daya manusia, tetapi dapat dilakukan melalui penguatan prosedur yang sudah ada. Pertama, pemeriksaan kas dapat diperkuat dengan cross-check oleh bendahara atau pengurus. Kedua, pemeriksaan persediaan dapat dilakukan secara berkala terhadap barang yang memiliki tingkat penjualan dan risiko kehilangan yang tinggi. Ketiga, pencatatan persediaan dapat dikembangkan agar lebih terintegrasi dengan sistem penjualan. Selain itu, MMP perlu menyusun SOP tertulis mengenai transaksi penjualan, penerimaan kas, pemeriksaan kas, pengelolaan persediaan, transaksi kredit internal, penanganan komplain, dan prosedur penyelesaian selisih kas maupun persediaan. SOP tersebut penting untuk memastikan bahwa pengendalian tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pengurus dan karyawan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal atas siklus penjualan dan penagihan pada Unit Usaha Mini Market Perpustakaan (MMP) KOPMA "Almamater" UNM telah berjalan, tetapi belum optimal. Pengendalian yang telah diterapkan mencakup pengawasan harian oleh pengurus, pencatatan transaksi digital melalui aplikasi Bubble yang dilengkapi pencatatan manual, pemeriksaan kas dan stok, pengendalian pembelian melalui APBK bulanan, pembatasan transaksi kredit internal sebesar Rp15.000 per hari dengan penagihan melalui pemotongan gaji oleh bendahara, serta kewajiban melaporkan selisih kepada bendahara. Kelemahan utama terletak pada pemisahan tugas yang belum memadai karena satu karyawan menjalankan seluruh proses mulai dari pemindaian barang hingga perhitungan kas akhir, perhitungan fisik persediaan secara menyeluruh yang baru dilakukan setiap akhir bulan, pembelian di atas APBK yang belum selalu didukung dokumentasi dan otorisasi, serta transfer pengetahuan antarpengurus dan pelatihan karyawan yang belum didukung prosedur tertulis. Dengan demikian, penggunaan sistem digital belum cukup untuk menjamin efektivitas pengendalian tanpa pembagian tugas, pemeriksaan silang, dokumentasi, dan pengawasan yang memadai. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengurus KOPMA

"Almamater" UNM disarankan menerapkan pemeriksaan silang oleh bendahara atau pengurus terhadap hasil perhitungan kas karyawan agar pihak yang menjalankan transaksi bukan satu-satunya pihak yang memeriksa hasilnya. Pengurus juga perlu menyusun prosedur operasional baku tertulis yang mencakup transaksi penjualan, penerimaan kas, pemeriksaan kas, pengelolaan persediaan, transaksi kredit internal, penanganan komplain, serta penyelesaian selisih, dilengkapi dokumen serah terima agar pengendalian tetap berkesinambungan saat terjadi pergantian kepengurusan. Pembelian yang melebihi APBK sebaiknya disertai otorisasi dan dokumentasi tertulis. Bagi pengelola MMP, pemeriksaan persediaan perlu dilakukan lebih rutin, terutama untuk barang dengan tingkat penjualan dan risiko kehilangan yang tinggi, disertai pencatatan persediaan yang terintegrasi dengan sistem penjualan dan pencatatan khusus atas setiap selisih transaksi. Pelatihan karyawan baru juga sebaiknya disertai pengawasan langsung dari pengurus. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu unit usaha pada satu koperasi mahasiswa dengan data yang bersumber dari pengurus dan karyawan, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi pada unit usaha atau koperasi mahasiswa lain. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek ke unit usaha KOPMA lainnya, seperti Kopma Store dan Mie Time, atau ke koperasi mahasiswa di perguruan tinggi lain, menggunakan kerangka penilaian yang lebih terstruktur seperti komponen COSO, serta menguji efektivitas prosedur tertulis setelah diterapkan.

DAFTAR REFERENSI

Achmadi, A. S., Maimuna, & Mashudi. (2025). Peran koperasi mahasiswa dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan (studi kasus pada Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(5), 1–11.

Amri, M. K., Salsabila, K. P., Zaqhila, A. R., & Aini R., F. N. (2025). Peran audit siklus penjualan dan penagihan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan (fraud). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, *17*(3), 2085–2099. https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1272

Anggraeni, A. A., Yusup, M., Rahman, R. S., & Rusjiana, J. (2024). The influence of cash sales accounting information systems on internal control of cash sales: Study of one company in the consumer goods distributor sector in Bandung. *Majalah Bisnis & IPTEK*, *17*(1), 67–78. https://doi.org/10.55208/bistek.v17i1.577

Anhar, H. M. (2026). Transformasi tata kelola koperasi mahasiswa pada Koperasi Mahasiswa Giri Widya Karta UPN “Veteran” Jawa Timur periode 2016–2018. *J-COOP*, *2*(2), 321–330.

Arlindayani, E. V., Yutanto, H., & Sihotang, E. T. (2022). Analisis penerapan perhitungan fisik dan pencatatan persediaan pada koperasi karyawan. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *11*(1), 141–164. https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.44257

Fernanda, A., Anisa, A., Fadlurahman, M. S., Jusfebrianti, & Rianti, D. E. (2025). Analisis efektivitas siklus penjualan dan penagihan pada PT Unilever Indonesia Tbk: Studi periode 2022–2024. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 3*(4), 153–166. https://doi.org/10.30640/trending.v3i4.4994

Handini, & Kusumo, W. K. (2026). The effectiveness of the accounting information system for sales and cash receipts in enhancing internal control: A case study of CV. House of Jesho, Semarang, Indonesia. *Scientia Accounting and Finance Journal, 1*(1), 1–23.

Karlina, A., Syakira, E., Anjeni, M., Khairiah, N., Putri, N. A., & Agustiawan. (2025). Analisis siklus penjualan dan penagihan pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, *2*(4), 297–302.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mpr.go.id/uploads/jdih/UUD_1945_DALAM_SATU_NASKAH.pdf

Marzuki, A. M., Zaman, B., & Widiawati, H. S. (2024). Analysis of sales and cash receipt accounting information systems to improve internal control at Foto Prima Kediri in 2023. *Proceeding Kilisuci International Conference on Economic & Business, 2*. https://doi.org/10.29407/35whje21

Maulana, F., & Permatasari, D. (2024). Evaluation of cash receipts and expenditure accounting information systems to improve internal control. *Gorontalo Accounting Journal, 7*(2), 232–240. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3499

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. https://study.sagepub.com/miles3e

Muthowif, Sofiyah, S. L., Kartika, M. G., Prakasa, D. F., Prihartanti, W., & Rahmanto, A. (2026). Pembentukan koperasi mahasiswa sebagai implementasi penguatan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(3), 16177–16184. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4509

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harfa Creative.

Pabaru, F., Tumanan, D. U., Balalembang, N., Valen, I. J., Roreng, P. P., & Mongan, F. F. A. (2024). Analisis penerapan akuntansi persediaan sparepart dan pengendalian internal persediaan pada PT United Tractors Tbk Cabang Makassar. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 7*(2), 829–840. https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.5230

Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-25-tahun-1992

Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., Kasnodihardjo, & Martha, E. (2018). *Panduan penelitian dan pelaporan penelitian kualitatif*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pujiati, H., & Yusnaldi. (2022). Accounting information system of sales and cash receivings for internal control in PT. Human Power. *Jurnal Mantik, 6*(3), 3117–3128. https://doi.org/10.35335/mantik.v6i3.3089

Putri, D. R. D., Atmojo, P., & Trifina, B. W. (2024). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas dalam pengendalian internal perusahaan.

Jurnal GeoEkonomi, *15*(1), 431–440. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.479

Rahmadani, H., & Abidin, F. I. N. (2022). Application of accounting information system for sales and cash receipts in an effort to improve internal control. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, *19*. https://doi.org/10.21070/ijins.v19i.685

Ramadhani, S. N., Ramadhani, K. N., Malik, R. F., Irwan, M. I., & Zaimar, F. R. (2026). Analisis siklus penjualan dan penagihan: Studi literatur pada PT Unilever Tbk tahun 2024. *Jurnal Liabilitas*, *11*(1), 12–24. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v11i1.559

Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Saputra, A., Faraknimela, L., Selvina, P., Herpan, N. F., Nur, P. A., & Zaimar, F. R. (2026). Evaluasi implementasi COSO internal control pada siklus penjualan dan penagihan UMKM Pisang Kipas. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, *11*(1). https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1

Widiapsari, Y. D., Puspitosarie, E., & Hasan, K. (2024). Menilai mekanisme pengendalian internal: Sistem informasi akuntansi dan persediaan di PT Jaring Abadi Retailindo. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, *17*(1), 1–6. https://doi.org/10.58431/jumpa.v17i1.232

Yadiati, W., Meiryani, Reyhan, Purnomo, A., Persada, S. F., Sudrajat, J., Siauwijaya, R., & Inasius, F. (2024). Evaluation of the implementation of an accounting information system for sales, cash receiving, and payroll on an internal control system. *Corporate Law & Governance Review*, *6*(1), 27–37. https://doi.org/10.22495/clgrv6i1p3